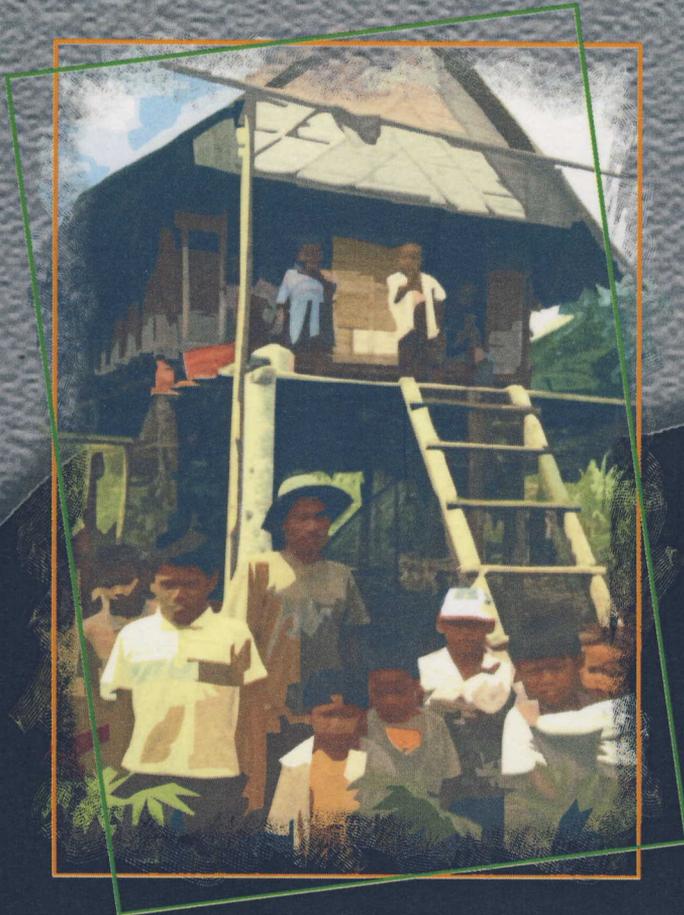


Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial

Peksos



*Pemberdayaan
Keluarga*

Peksos



Pemberdayaan Keluarga

Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial
Peksos

Penanggung Jawab	:	Drs. A. Nelson Aritonang, M.S.S.W.
Penyunting Penyelia	:	Prof. Kusnaka Adimihardja, Ph.D. Prof. Irawan Soehartono, D.S.W. Dr. Carolina Nitimihardjo Edi Suharto, Ph.D. Adi Fahrudin, Ph.D.
Ketua Redaksi	:	Drs. Herry Koswara, M.Si.
Dewan Redaksi	:	Drs. Edi Suhandi, M.Si. Dra. Lina Favourita S, M.Si. Dr. Eka Kanya Santi, MSW. Dra. Milly Mildawati, MP.
Redaksi Pelaksana	:	Drs. Bambang Sugeng, M.P. Drs. Badrun Susantyo, M.Si.

Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial adalah jurnal ilmiah artikel dan hasil penelitian pekerjaan sosial / kesejahteraan sosial. Untuk menunjang kelangsungan eksistensi Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Peksos, redaksi mengundang para penulis dan peneliti untuk menyumbangkan artikel dan hasil penelitian di bidang pekerjaan sosial / kesejahteraan sosial. Artikel dan hasil penelitian tersebut (1) bersifat orisinal berupa ide/gagasan maupun hasil penelitian perorangan/kelompok yang belum atau tidak akan dipublikasikan; (2) Naskah diketik 1 spasi menggunakan MsWord, font Arial 10 atau Times New Roman 11; (3) Jumlah halaman naskah 10 – 15 halaman, menggunakan kertas HVS ukuran A4, dengan menyertakan softcopy beserta biodata penulis; (4) Naskah/Artikel tulisan ilmiah disajikan dengan sistematika Judul, Abstrak (berbahasa Inggris untuk naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dan sebaliknya), Pendahuluan, Isi Tulisan Ilmiah (Pembahasan), Kesimpulan, dan Daftar Pustaka; (5) Naskah hasil penelitian, disajikan dengan sistematika: Judul, Abstrak (berbahasa Inggris untuk naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dan sebaliknya), Pendahuluan, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka.

Dilarang mengutip, menerjemahkan atau memperbanyak, kecuali dengan ijin dari redaksi.

Instalasi Penerbitan STKS Press
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
Jl. Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135
Email: stkspress@stks.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Terakreditasi dengan SK No. 39/DIKTI/Kep/2004

Daftar Isi

PENGANTAR EDITORIAL

Redaksi

v - viii

**PENGHAPUSAN BENTUK TERBURUK PEKERJA ANAK
MELALUI PEMBERDAYAAN SOSIAL KELUARGA**

Yana Sundayani

1201 - 1218

**MEMBANGUN KELUARGA MELALUI TERAPI
MENURUT PERSPEKTIF MODEL STRUKTURAL
KOMUNIKASI DAN HUMANISTIK**

Kormauli Simanihuruk

1219 - 1235

**KEPÈMIMPINAN ORANGTUA DALAM KELUARGA DAN
KETERLIBATAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN
NARKOBA**

(Studi Kasus di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat "Sembada"
Medan, Sumatera Utara)

Matias Siagian

1236 - 1254

**PERANAN ORANGTUA DALAM MENSOSIALISASI
KESEHATAN REPRODUKSI PADA REMAJA**

Yuni Ratna Sari

1255 - 1270

**BIAS GENDER DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PASCA TSUNAMI DI ACEH BESAR**

Agussabti

1271 - 1286

**ASIAN FAMILIES AND MIGRANT WORKERS:
ISSUES AND CHALLENGES**

Ima Zulkarnain Ahmad Hatta
1287 - 1308

**PENGARUH STRES PEKERJAAN TERHADAP KEBERFUNGSIAN
KELUARGA PEKERJA DI KOTA BANDUNG**

*Herry Koswara, Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc.,
Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS., Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc.*
1309 - 1322

**PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGURUS ORGANISASI LOKAL
DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA**

(Studi Eksperimen pada Organisasi PKK di Desa Sirnajaya,
Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut)

Rokna Murni, dkk
1323 - 1351

**MODEL DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN
DI KABUPATEN BOGOR**

*Abubakar Iskandar, Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc.,
Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc., Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS.*
1352 - 1373

**KEBERDAYAAN KELUARGA DI PERKOTAAN DAN PEDESAAN:
KASUS KELUARGA DI KECAMATAN DUREN SAWIT DAN
KECAMATAN JASINGA**

*Astriana Baiti, Dr. Ir. Sumardjo, MS, Prof. Dr. H.R. Margono Slamet, M.Sc.,
Dr. H. Prabowo Tjitropranoto, M.Sc.*
1374 - 1392

MODEL DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BOGOR

Abubakar Iskandar¹, Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc.²,
Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc.³, Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS.³

ABSTRACT

The improvement of family well-being has become a major objective of national development program. There are many programs to increase the family well-being have been implemented. However, in 2006, there are still about 39.05 million people (17.8%) live in poverty. The objective of the research is to determine factors affecting the family welfare and the efforts of family to enhance their livings. A cross sectional survey involving 240 randomly selected samples of family in eight purposively selected villages has been conducted. The aspects of family resource management that significantly influencing family well-being are planning, organizing, and controlling. The results of the study indicated that planning is significantly influenced by rural area ($p < 0.05$), distribution of duty in family is significantly influenced by rural area ($p < 0.05$), and husband education ($p < 0.01$), and controlling is significantly influenced by income ($p < 0.05$). The Study use four methods to indicate family well-being, those are BPS (expenditure per capital compared to poverty line), BKKBN (six qualitative indicators), proportion of food expenditure, and family perception of their well-being. The results of the study indicated that prevalence of poor family of the sample in the rural area was vary from 6.6% (BPS methods) to 67.2% (perception family methods), prevalence of poor family of the sample in the urban area was vary from 15,0% (BPS methods) to 71.7% (perception family methods). By using BPS method as a benchmark, BKKBN and proportion of food expenditure methods in the rural area are considered to be high specificity, while

¹ Mahasiswa S3 Program Studi IKK-GMK

² Ketua Komisi Pembimbing

³ Anggota Komisi Pembimbing

family perception method is considered to be high sensitivity method. But by using BPS method as a benchmark, and proportion of food expenditure methods in the urban area are considered to be high specificity, while BKKBN methods and perception family are considered to be high sensitivity. Urban area tends to have higher prevalence of poor family as compared to rural area.

Key word: Family Well-Being, Poverty, Poverty Indicators and Family Resource Management

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan atau ketidaksejahteraan merupakan fenomena sosial, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan standar kebutuhan yang lain (Herbert, 2001). Penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan atas dua hal yaitu faktor alamiah dan faktor non alamiah. Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1, keluarga yang miskin atau tidak sejahtera merupakan tanggung jawab negara. Bentuk tanggung jawab tersebut terlihat dari peran berbagai institusi mengadakan penanggulangan sesuai bidangnya seperti Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Departemen Sosial), Takesra, Kukesra (BKKBN), dan lain-lain. Dalam kurun waktu 1970-1996 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 1970 sebanyak 70 juta menurun menjadi 22.5 juta pada tahun 1996 (Suyono, 1997). Akibat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 jumlah penduduk miskin meningkat sangat tajam menjadi 49.50 juta (24.23%) pada tahun 1998, bahkan Bank Dunia (2006) mengatakan hampir 50% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, yaitu berpendapatan kurang dari 2 dollar AS perkapita perhari. Sementara itu, BPS (2006) melaporkan pada Maret 2006 ada 39.05 juta (17.8%) penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, lebih tinggi dari pada tahun 2005 yaitu 35.10 juta (16%).

Sumberdaya yang dimiliki keluarga jika tidak diatur secara baik melalui manajemen sumberdaya keluarga yang meliputi perencanaan, pembagian

tugas, dan pengawasan. Di lain pihak, beragam kriteria untuk mengukur tingkat kemiskinan melahirkan kemiskinan bangsa yang "turun naik" yang dapat menimbulkan interpretasi bahwa kemiskinan sengaja dibesarkan sebagai proyek berkelanjutan (duniaesai.com, 2006). Hal ini diakibatkan oleh program penanggulangan selama ini menggunakan data makro hasil Susenas oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga Pra Sejahtera dan KS I oleh BKKBN. Beragam kriteria yang diturunkan dapat membingungkan pemerintah lokal ketika ada bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat berpedoman pada angka kemiskinan yang dihasilkan BPS, sedangkan pemerintah lokal menggunakan kriteria BKKBN sebagai target sasaran.

Berdasarkan ulasan tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu: Pertama, sejauhmanakah faktor yang berpengaruh terhadap praktek manajemen sumberdaya keluarga? Kedua, bagaimanakah menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga dengan berbagai metode pengukuran? Ketiga, bagaimanakah merumuskan model dan strategi pemberdayaan keluarga miskin?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor yang mempengaruhi praktek manajemen sumberdaya keluarga
2. Menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga dengan berbagai metode pengukuran
3. Merumuskan model dan strategi pemberdayaan keluarga

METODE

1. Desain, Lokasi dan Waktu Penelitian

Desain penelitian adalah *cross sectional survey*. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten dan Kota Bogor. Penelitian dilakukan bulan April 2006 s/d bulan April 2007.

2. Teknik Penarikan Contoh

Contoh dalam penelitian adalah keluarga yang tinggal di Kabupaten dan Kota Bogor. Di Kabupaten Bogor dipilih tiga Kecamatan secara *purposive* yaitu Wilayah Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Timur. Wilayah Barat diambil Kecamatan Ciampea, Wilayah Tengah diambil Kecamatan Cisarua, Wilayah Timur diambil Kecamatan Gunungputri. Sementara itu, di Kota Bogor dipilih Kecamatan Bogor Tengah. Ke empat Kecamatan tersebut dipilih secara *purposive*. Selanjutnya tiap Kecamatan dipilih dua kelurahan/desa secara *purposive* yang diambil dari hasil pendataan keluarga tahun 2005. Tiap desa/kelurahan diambil contoh sebesar 30 yang terdistribusi pada kriteria sejahtera menurut BKKBN, sehingga jumlah sampel sebanyak 240 keluarga. Penarikan contoh dilakukan secara proporsional (*Proportional Stratified Random Sampling*).

3. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui tiga cara yaitu: (1) penyuntingan data melalui angket, (2) pemasukan data ke dalam lembaran (buku) secara manual, (3) pemasukan data ke dalam komputer. Proses pemasukan data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: pengeditan (*editing*) data, pengkodean (*coding*) data, pemasukan data ke dalam computer (*entry data*), pembersihan data (*cleaning*) dengan cara melihat distribusi frekuensi setiap peubah. Apabila ada kesalahan memasukan data ke komputer, dilakukan pengecekan ulang ke kuesioner, pemasukan data dilakukan melalui dua fasilitas yaitu: pemasukan data melalui *Micro Excel* sebelum dianalisis melalui program SPSS.

b. Analisis Data

Fraenkel dan Wallen (1993) mengatakan bahwa analisis data dalam jenis penelitian seperti ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan jasa statistik untuk menguji hubungan antar variabel penelitian (yang diwujudkan dalam bentuk menguji hipotesis penelitian) melalui analisis regresi logistik dan khi kuadrat. Analisis regresi logistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh nyata atau tidak suatu

variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan nyata antara satu kriteria dengan kriteria lainnya. Sementara itu, analisis data kualitatif menggunakan teknik *content analysis* (analisa isi). Setiawan dan Muntaha (2000) mengatakan, *content analysis* adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi, dan biasanya yang menjadi sumber penelitian adalah data verbal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang mempengaruhi Manajemen Sumberdaya Keluarga

Analisis dilakukan melalui beberapa faktor internal/eksternal yang mempengaruhi proses manajemen. Responden yang tinggal di kota memiliki peluang lebih tinggi 2.705 kali untuk melakukan perencanaan dibanding contoh yang tinggal di desa.

Tabel 1 Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan dalam Keluarga

Variabel Bebas	Perencanaan (0=tidak, 1= ya)		
	β	Sig	OR
Jumlah Anggota	0.050	0.552	1.051
Umur KK	0.022	0.403	1.022
Umur Istri	-0.045	0.124	0.956
Pendidikan KK	0.134	0.232	1.143
Pendidikan Istri	-0.204	0.076	0.818
Pendapatan	$3.5 \cdot 10^{-7}$	0.373	1.000
Aset	0.009	0.806	1.009
Lokasi (1=kota, 0=kab)	0.995	0.009**	2.705
R ²	0.173		

Keterangan: *(p<0.01), **(p<0.05), ***(p<0.1)

Pendidikan KK yang tinggi berpeluang lebih tinggi 1.373 kali untuk melakukan pembagian tugas dibanding KK yang tingkat pendidikannya rendah. Contoh yang tinggal di kota berpeluang lebih tinggi 3.477 kali untuk melakukan pembagian tugas dibanding contoh yang tinggal di desa. Pembagian tugas adalah distribusi kewenangan atau tanggungjawab kepada anggota sehingga tidak menjadi beban

salah satu anggota, dengan begitu semua pekerjaan berjalan secara teratur, tanpa pembagian tugas yang jelas menyebabkan saling menunggu dan mengharapkan siapa yang sesungguhnya akan melaksanakan pekerjaan tersebut.

Tabel 2 Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Tugas dalam Keluarga

Variabel Bebas	Pembagian Tugas (0=tidak, 1= ya)		
	β	Sig	OR
Jumlah Anggota	0.037	0.675	1.038
Umur KK	-0.023	0.627	0.967
Umur Isteri	0.022	0.498	1.022
Pendidikan KK	0.317	0.012*	1.373
Pendidikan Isteri	0.212	0.081	0.809
Pendapatan	$-6.7 \cdot 10^{-7}$	0.207	1.000
Aset	-0.029	0.456	0.972
Lokasi (1=kab, 0=kota)	1.246	0.001**	3.477
R ²	0.172		

Keterangan: *(p<0.01), **(p<0.05), ***(p<0.1)

Hal ini di dukung oleh penelitian Rezeki (2006) bahwa dalam hal keuangan di atur oleh isteri baik ibu bekerja (65.1% maupun ibu tidak bekerja (56.7%). Penyediaan menu sehari-hari pada ibu bekerja (90.9%) maupun ibu tidak bekerja (86.5%). Contoh yang pendapatannya tinggi berpeluang 1.000 kali untuk tidak melakukan pengawasan dibanding contoh yang pendapatannya rendah

Tabel 3 Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Kegiatan Keluarga

Variabel Bebas	Pengawasan (0=tidak, 1= ya)		
	β	Sig	OR
Jumlah Anggota	0.160	0.212	1.173
Umur KK	-0.023	0.478	0.977
Umur Isteri	0.018	0.630	1.0108
Pendidikan KK	0.292	0.050	1.339
Pendidikan Isteri	-0.078	0.615	0.925
Pendapatan	$-1.3 \cdot 10^{-6}$	0.007**	1.000
Aset	-0.006	0.897	0.994
Lokasi (1=kab, 0=kota)	-0.349	0.504	0.705
R ²		0.141	

Keterangan: *(p<0.01), **(p<0.05), ***(p<0.1)

Dari ketiga unsur manajemen yang ada dengan menggunakan model yang sama, justru unsur perencanaan yang dipandang lebih baik dengan R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0.173 yang artinya bahwa tingkat kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh perencanaan dengan probabilitas (sig) yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($0.008 < 0.05$).

2. Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Akurasi berbagai Metode Pengukuran Kesejahteraan

Uji sensitifitas dan spesifisitas dilakukan untuk menilai berbagai indikator kesejahteraan. Sensitifitas (Se) adalah kemampuan untuk menemukan rumah tangga miskin, sedangkan spesifisitas (Sp) adalah kemampuan untuk menemukan rumah tangga yang tidak miskin. Hasil analisis khi kuadrat menunjukkan ada hubungan yang nyata ($p < 0.01$) antara kriteria kemiskinan BKKBN, pengeluaran pangan, dan kriteria BPS, sedangkan kriteria persepsi keluarga menunjukkan tidak adanya hubungan yang nyata ($p > 0.05$) dengan kriteria BPS. Persentase misklasifikasi (positif semu) yang cukup tinggi terjadi pada kriteria persepsi keluarga yaitu 65.5%, sementara misklasifikasi pada kriteria BKKBN sebesar 41.1%. Menurut kriteria BKKBN dan kriteria persepsi keluarga mengkategorikan rumah tangga adalah miskin, ternyata menurut kriteria BPS tidak miskin. Persentase misklasifikasi yang paling rendah terjadi pada kriteria pengeluaran pangan yaitu sebesar 22.0%.

Tabel 4 Sebaran Contoh berdasarkan Kriteria BKKBN, Pengeluaran Pangan, Persepsi Keluarga dengan Kriteria BPS sebagai *benchmark* di Desa

Indikator	Status Kemiskinan	Kriteria Kemiskinan BPS						Khi Kuadrat
		Miskin		Tidak Miskin		Total		
		n	%	n	%	n	%	
BKKBN	Miskin	10	83.3	69	41.1	79	43.9	0.005*
	Tidak Miskin	2	16.7	99	58.9	101	56.1	
	Total	12	100.0	168	100.0	180	100.0	
Pengeluaran Pangan	Miskin	10	83.3	37	22.0	47	26.1	0.000*
	Tidak Miskin	2	16.7	131	78.0	133	73.9	
	Total	12	100.0	168	100.0	180	100.0	
Persepsi Keluarga	Miskin	11	91.7	110	65.5	121	67.2	0.042
	Tidak Miskin	1	8.3	58	34.5	59	32.8	
	Total	12	100.0	168	100.0	180	100.0	

Keterangan: *nyata pada $p < 0.01$

Di lain pihak, sebaran keluarga contoh di daerah perkotaan dengan menggunakan indikator kesejahteraan BKKBN, pengeluaran pangan dan persepsi keluarga dengan menggunakan BPS sebagai *benchmark* menunjukkan ada hubungan yang nyata ($p < 0.05$) antara kriteria kemiskinan BKKBN, pengeluaran pangan, dan kriteria BPS, sedangkan kriteria persepsi keluarga menunjukkan tidak adanya hubungan yang nyata ($p > 0.05$) antara kriteria persepsi keluarga dengan kriteria BPS. Persentase misklasifikasi yang cukup tinggi terjadi pada kriteria persepsi keluarga yaitu 68.6%, sementara misklasifikasi pada kriteria BKKBN sebesar 52.9%. Menurut kriteria BKKBN dan kriteria persepsi keluarga mengkategorikan rumah tangga adalah miskin, ternyata menurut kriteria BPS tidak miskin.

Persentase misklasifikasi yang paling rendah terjadi pada kriteria pengeluaran pangan yaitu sebesar 19.6%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensitifitas yang tinggi di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan terjadi pada kriteria BKKBN dan kriteria persepsi keluarga, sebaliknya spesifisitas yang sangat tinggi terjadi pada kriteria pengeluaran pangan, jika menggunakan BPS sebagai *benchmark*

Tabel 5 Sebaran Contoh berdasarkan Kriteria BKKBN, Pengeluaran Pangan, Persepsi Keluarga dengan Kriteria BPS sebagai *benchmark* di Kota

Indikator	Status Kemiskinan	Kriteria Kemiskinan BPS						Chi Kuadrat
		Miskin		Tidak Miskin		Total		
		n	%	n	%	n	%	
BKKBN	Miskin	9	100.0	27	52.9	36	60.0	0.006**
	Tidak Miskin	0	0.0	24	47.1	24	40.0	
	Total	9	100.0	51	100.0	60	100.0	
Pengeluaran Pangan	Miskin	6	66.7	10	19.6	16	26.7	0.036**
	Tidak Miskin	3	33.3	41	80.4	44	73.3	
	Total	9	100.0	51	100.0	60	100.0	
Persepsi Keluarga	Miskin	8	88.9	35	68.6	43	71.7	0.205
	Tidak Miskin	1	11.1	16	31.4	17	28.3	
	Total	9	100.0	51	100.0	60	100.0	

Keterangan: **nyata pada $p < 0.05$

Model dan Strategi Pemberdayaan Keluarga Miskin

Model adalah deskripsi tentang keterkaitan antara kebutuhan, potensi dan masalah, yang disederhanakan dalam suatu pemikiran logis berdasarkan kenyataan. Berlo (1960) mengembangkan model berdasarkan teori dan hasil penelitian dalam bidang ilmu perilaku. Dalam menyusun model, Berlo melakukan beberapa kali perubahan sebagai hasil diskusi, kursus, penelitian, dan seminar. Model bisa berbeda-beda tentang suatu fenomena. Model tertentu tidak bisa dikatakan paling benar, tetapi beberapa diantaranya lebih berguna daripada yang lain atau lebih cocok dalam mencapai suatu tujuan (Berlo, 1960, Collett, 1991). Misalnya, berbagai model yang dikembangkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Tujuan utama dari model-model tersebut adalah untuk memperbaiki kesejahteraan. Model pemberdayaan ini kemudian dioperasionalkan melalui berbagai program.

Berbagai program yang diturunkan oleh pemerintah sebelum krisis sangat berhasil menekan prevalensi kemiskinan dari tahun 1970 sebanyak 70.0 juta berhasil dikurangi menjadi 22.5 juta pada tahun 1996. Beberapa program yang diluncurkan dari berbagai departemen/instansi seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dari Depsos, Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil dan Nelayan (P4K) dari Deptan, Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain. Tujuan inti dari program-program ini adalah meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat miskin sehingga tidak menambah parah bagi keluarga miskin. Namun terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998 kemiskinan kembali meningkat secara tajam menjadi 49.5 juta, kemudian angka ini menurun pada tahun 2005 menjadi 35.10 juta, tetapi meningkat lagi menjadi 39.05 juta pada tahun 2006.

Sehubungan dengan naik turunnya angka kemiskinan tersebut muncullah berbagai kritik terhadap model pemberdayaan yang telah dilakukan. Misalnya, upaya penanggulangan keluarga miskin yang diterapkan di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia dengan menggunakan dalil *trickle down effect*, dinilai telah gagal. Menurut pendekatan ini, yang amat penting adalah pertumbuhan ekonomi karena adanya investasi (golongan mampu). Konsekuensinya

kemudian adalah golongan miskin akan mendapat pengaruh atau tetesan dari pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh produktivitas ekonomi pada golongan kaya. Namun demikian dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, pendekatan ini memiliki *mode of production* yang berorientasi keuntungan yang sebesar-besarnya dan menempatkan buruh sebagai alat produksi semata yang harus mengikuti kemauan pemilik perusahaan (Sarwoprasodjo, 1993). Kritik lain terhadap sejumlah pendekatan pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Depsos misalnya, masih terbukti tingginya jumlah kelompok yang mati (Anonim, 1989). Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah: (a) pengalaman usaha, (b) jenis usaha, (c) jumlah anggota dan pengelola usaha, (d) tempat usaha, (e) perkembangan modal, dan (f) perkembangan keuntungan (Sarwoprasodjo, 1993).

Penelitian Sarwoprasodjo (1993) menunjukkan bahwa pengalaman usaha menjadi hal penting dalam menunjang kesinambungan usaha terutama dalam hal teknis pengelolaan usaha. Latihan ketrampilan yang diberikan kepada anggota kurang memadai, terlalu singkat dan lebih bersifat teoritis, latihan lebih banyak hal-hal yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan kelompok. Jenis usaha yang dikembangkan tidak sesuai dengan keinginan anggota sehingga usahanya tidak bertahan lama karena tidak memiliki pengalaman usaha di bidang tersebut. Lahan usaha yang bukan milik anggota kelompok cenderung akan mati karena akan ada biaya tambahan untuk sewa sehingga modal usaha semakin berkurang, pada akhirnya usaha semakin tidak menguntungkan dan anggota enggan melanjutkan kegiatan kelompok. Perkembangan permodalan kelompok menunjukkan prospek usaha KUBE yang kurang baik. Perkembangan permodalan sangat berhubungan dengan kesinambungan kelompok. Kelompok yang tidak aktif mempunyai perkembangan modal yang semakin menurun, sehingga keuntungannya juga semakin menurun, jika tidak ada tambahan modal akan semakin banyak kelompok yang mati atau tidak aktif.

Kritik lain misalnya proyek P4K ((Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil) dari Deptan. Menurut Suhandi (2007), proyek ini masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengelolaannya antara lain: (a) kemampuan PPL dalam membina variasi usaha kelompok, (b)

penyimpangan dana oleh PPL dan ketua, (d) terjadinya ikatan kolusi di tingkat pengurus. PPL yang ditugaskan pada kelompok usaha tidak memiliki pengetahuan kewiraswastaan sehingga sulit untuk melakukan pembinaan terhadap petani yang berusaha di sektor lain yang bersifat produktif dan komersial, kecuali memiliki pengetahuan teknis di bidang pertanian. Pada tingkat struktur, terjadinya penyimpangan dana oleh ketua dan PPL. Kadang-kadang uang pinjaman dipakai oleh ketua dan PPL sehingga menimbulkan kemacetan dalam usaha kelompok. Selain itu, terjadinya ikatan kolusi di tingkat struktur yang cenderung mendistribusikan uang pinjaman kepada keluarga yang bukan individu sasaran. Kasus lain misalnya JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang juga masih memiliki beberapa kelemahan antara lain: (a) mekanisme koordinasi antar instansi vertikal maupun horisontal belum kukuh, terutama dalam menetapkan kelompok sasaran, jumlah dan lokasinya, (b) mekanisme penyaluran dana belum menjangkau langsung masyarakat lapisan paling bawah, (c) kelompok sasaran yang memanfaatkan program belum jelas baik tentang siapa, di mana, dan apa kegiatannya, (d) penetapan upah tenaga kerja yang bervariasi sehingga pembakuan pedoman untuk menilai keberhasilan program sulit dilakukan (Sumodiningrat, 1999). Masih banyak institusi pemberdayaan keluarga miskin yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Kritik terhadap pendekatan penanggulangan keluarga miskin yang ada saat ini adalah terlalu berorientasi pada pendekatan pemenuhan kebutuhan minimum. Program-program yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan minimum seperti: Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian santunan kepada golongan miskin, pemberian subsidi kepada golongan miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi tanpa diikuti oleh pembentukan perekayasaan sosial untuk memperbaiki struktur sosial yang ada. Pendekatan ini dinilai tidak melihat masalah produktivitas dan partisipasi sosial keluarga miskin, dan kurang mendidik masyarakat untuk melakukan usaha-usaha ke arah produktivitas. Kritik terakhir terhadap program pemerintah adalah bahwa pemerintah menempatkan diri sebagai aktor utama penanggulangan kemiskinan. Pemerintah yang didukung oleh kekuatan kekuasaan plus memiliki akses dan aset dipandang sebagai pelaku yang mampu melakukan intervensi terhadap kemiskinan,

karena itu, penanggulangan kemiskinan hanya bisa diatasi kalau dijamin oleh pemerintah yang kuat. Pendekatan ini kadang-kadang memaksakan masyarakat untuk mengikuti apa yang pemerintah kehendaki.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan berbagai upaya pemberdayaan tersebut di atas maka alternatif pemecahan dilakukan melalui pendekatan "proses belajar" atau secara sederhana pendekatan proses (Korten, 1981). Pendekatan ini meliputi beberapa dimensi antara lain: dimensi struktural dan fungsional, dimensi kognitif, dimensi moral, asas demokrasi, dan strategi pemberdayaan.

Dimensi struktural dan fungsional mengacu pada pembentukan kelompok-kelompok kecil sebagai wadah pelaksanaan program. dengan memberikan kedudukan dan fungsi kepada masing-masing kelompok baik terhadap pengelola maupun individu sasaran. Ada dua pertimbangan yang menjadi dasar pendekatan struktural dan fungsional. Pertama, dilihat dari aspek pembinaan memungkinkan pembina untuk membina kelompok baik secara struktural maupun fungsional. Pembinaan struktural dan fungsional disini adalah siapa harus bertanggungjawab kepada siapa dan siapa melaksanakan apa. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah sistem dan mekanisme kerja kelompok. Kedua, dari sudut kepentingan, pendekatan ini memungkinkan anggota untuk mengembangkan kemampuan bekerjasama.

Dimensi kognitif berorientasi pada beberapa aspek antara lain: (1) pendidikan dan pelatihan, (2) sosialisasi berbagai regulasi yang lebih mengarah pada sanksi hukum dan sanksi sosial. Agar kelompok usaha tetap eksis dalam usahanya maka perlu dilakukan pengembangan kegiatan ekonomi produktif melalui berbagai kegiatan antara lain: (a) diadakannya pendidikan dan latihan ketrampilan baik terhadap kelompok sasaran maupun terhadap fungsionaris kelompok atau pendamping, (b) dilakukannya bimbingan kewirausahaan, (c) dilakukannya bimbingan pemasaran, (d) diadakannya apresiasi wirausaha (Tjiptoherijanto, 2002). Program pendidikan dan pelatihan dapat menerapkan konsep *Community College* (Rahardjo, 2000). Inti konsep ini adalah peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap, pendidikan, latihan dan penyuluhan yang merespon kebutuhan ekonomi dan bisnis. Seandainya keluarga miskin ingin mengembangkan agribisnis umpamanya, maka *stakeholders* harus

meramu kurikulum dan *sillabus* agribisnis, bahkan lebih khusus lagi misalnya, hortikultura, dan lain-lain. Upaya pemahaman kondisi obyektif dan interpretasi subyektif juga perlu dilakukan melalui penelitian. Misalnya perekonomian masyarakat Bogor saat ini sedang mencari bentuknya ketika memasuki perekonomian global yang makin berorientasi pasar maka *stakeholders* perlu melakukan penelitian agar lebih meningkatkan efisiensi dan daya saingnya melalui analisis SWOT dan lain-lain, sehingga dapat menemukan strategi baru yang bisa berkompromi dengan realitas.

Supaya tidak terjadi penyimpangan di dalam mengelola kelompok, maupun untuk mendapatkan perlakuan yang adil sehingga keluarga dapat mengakses berbagai aset yang disiapkan *stakeholders* maka penerapan sistem birokrasi legal rational menjadi sangat penting. Muhaimin (2000) mengatakan bahwa birokrasi legal rational terdapat pemisahan yang jelas antara hubungan kerabat, teman, kenalan dengan kepentingan kelompok. Hubungan antara anggota dengan pengurus bersifat impersonal yaitu ditentukan oleh peraturan. Penerapan konsep birokrasi seperti ini bertujuan untuk membuka sistem-sistem yang tidak menghambat dalam usaha (pengembangannya), mencegah terjadinya sistem kolusi dan nepotisme di struktur, siapa yang melakukan penyelewengan harus diberikan sanksi sosial berupa dikucilkan dari masyarakat, atau sanksi juridis berupa hukuman atau denda.

Dimensi moral berorientasi pada pendekatan sikap dan kultur masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk merespons opini, keyakinan, perasaan, preferensi dan pernyataannya tentang perilaku. Pendekatan seperti inilah kemudian sikap itu diartikan sebagai suatu bangunan psikologis. Membangun adalah cara-cara mengkonseptualisasikan unsur-unsur yang tak mudah dipahami daerah yang diselidiki oleh suatu ilmu tertentu. Para ilmuan sosial menyelidiki keyakinan dan perilaku orang dalam usahanya untuk menarik kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan mental dan proses mental. Sikap tidak dapat diobservasi atau diukur secara langsung. Keberadaannya harus ditarik kesimpulan dari hasil-hasilnya. Dengan demikian sikap dapat didefinisikan sebagai kesetujuan mandiri yang mempengaruhi atau menolak sebagai suatu komponen yang kritis pada konsep sikap itu (Mueller, 1992)

Kesetujuan untuk menerima atau menolak suatu perubahan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan serta adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Mereka yang bertahan pada kebiasaan dipandang sebagai "tradisional" dan disebut sebagai "reaksioner" atau "kolot/konservatif". Arti tradisi yang paling mendasar adalah traditum yaitu sesuatu yang diteruskan (*transmitted*) dari masa lalu ke masa sekarang berupa benda atau tindakan (Pudjiwati Sajogyo, 1985).

Berbicara mengenai tradisi adalah berbicara mengenai sesuatu yang mempunyai fungsi untuk menjaga atau memelihara yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat yang hidup sesuai dengan tradisi yang tidak terputus-putus, dan kemudian datangnya masyarakat moderen dipandang malapetaka bagi kehidupan masyarakat tradisional. Perubahan yang mempertemukan berbagai insan dari berbagai latar akan melahirkan kesepakatan-kesepakatan kultural baru yang sudah tentu boleh diharap akan memperkaya kehidupan manusia sebagai satu kesatuan sistem (umat). Kesepakatan-kesepakatan baru inilah yang akan memungkinkan interaksi dan transaksi antar manusia dalam kehidupan baru. Kehidupan baru yang tertengarai sebagai *one world* tetapi *not divided* akan mendorong terjadinya kerjasama yang dilandasi solidaritas atas landasan humanisme, bukan konfrontasi yang sering melahirkan konflik laten maupun potensial. Yang akan menjadi sorotan utama adalah unsur-unsur manakah yang harus dilihat sebagai esensi yang nas dan hakiki dan mana pulakah yang boleh diinterpretasi sebagai sesuatu yang imanen (dan tidak transenden), dan karena itu pula boleh saja ditawarkan untuk diadaptasikan secara kontekstual ke tuntutan-tuntutan perubahan (Wignjosoebroto, 1995). Dalam hubungannya dengan dimensi moral, maka ada dua elemen utama yang dipandang adalah: pendidikan, dan ekonomi.

Pendidikan. Transformasi pendidikan dengan ajaran-ajaran baru yang *text book oriented*, *journal oriented*, dan lain-lain atau bercorak urban industrial akan memaksakan perubahan-perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan, maka tak ayal kecakapan dan kearifan yang bertradisi lokal yang berciri rural agrarian mungkin tak akan menahan lajunya perubahan, karena perubahan itu sendiri lebih berfungsi dan relevan dengan tuntutan kehidupan baru. Dalam proses transformasi seperti itu, terlahirkannya generasi baru yang bisa

berfungsi dan difungsikan, yang kadang ditebus dengan konflik-konflik kultur yang bersegmen konflik kaidah dan konflik nilai. Keberfungsian generasi baru itu, sebagai akibat dari program-program yang di *link-and-match-*kan yang bermisi ke kebutuhan dan tuntutan dunia produksi maupun yang berskala proyek-proyek *crash programs* yang berorientasi pelatihan-pelatihan yang bertujuan menerampilkkan kaki tangan anak-anak manusia sehingga akan siap pakai dan siap dipakai, dari pada manusia yang sarat deterministik oleh warisan lama yang akan digilas oleh perubahan dan kemudian mereka ini tetap menyelinap di zona degradasi.

Ekonomi. Perbincangan tentang kehidupan ekonomi keluarga pada ujung-ujungnya selalu saja terkesan pembicaraan yang mengarah ke tema tentang kehidupan ekonominya golongan yang *powerless*. Golongan lemah adalah golongan yang selalu saja terpuruk di papan bawah, semua ini pastilah karena adanya lingkungan budaya yang mengepungnya. Budaya ini memiliki kemungkinan untuk menghabiskan hasil-hasil kerja untuk kepentingan yang *overconsumptive* yang diharamkan sebagai pemborosan dan sekali-kali diwarnai oleh motif kelaliman, pada akhirnya lalu menyebabkan kehidupan ekonomi keluarga menjadi stagnan pada tarafnya yang disitu-situ melulu, investasi yang ekonomik pun tak akan kunjung tergalakkan. Di sisi lain, keluarga juga kurang mengenal imperativa tentang mulianya kerja keras, peminta-minta merusak wajah jalanan umum, ataupun atas nama kegiatan sosial (pembangunan gereja, masjid, musholla, dan lain-lain) yang menunjukkan pola perilaku yang dicerca kalau kemudian sumbangan ini mengalami pembelotan dari yang semula untuk kepentingan umum tetapi kemudian dijarah menjadi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Stakeholders yang memiliki infrastruktur dan suprastruktur maupun keluarga yang bekerja keras kemudian menjadi kapitalis, yang sudah amat cenderung kapitalistik mesti membelanjakan hasil kerja keras untuk maksud yang paling dihalalkan ialah yang memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan atau untuk kepentingan umum haruslah tetap didasarkan pada asas keadilan, kebaikan, dan serba moderat. Dengan konsep-konsep seperti ini pada akhirnya lalu menyebabkan kehidupan ekonomi keluarga yang mapan karena setiap kali sejumlah kekayaan negeri atau pribadi diperoleh setiap kali itu

pula dihakkanlah kepada masyarakat untuk memungut dan menyebarkan kembali kepada masyarakat itu, lewat institusi maupun lewat individu. Ibadah ekonomi yang humanistik seperti dipaparkan dimuka apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam ranah keadilan, kesamaan, pemerataan dan kerjasama memungkinkan terjadinya proses-proses *the accumulation of wealth* untuk keperluan investasi dan pengembangan ekonomi keluarga.

Asas demokrasi berorientasi pada pendekatan yang lebih bersifat *participatory*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melibatkan anggota baik dalam merencanakan usaha, jenis usaha apa yang layak menurut anggota, berapa modal usaha yang diperlukan, tempat mana yang layak untuk mengembangkan usaha dan lain-lain. Disamping itu, pendekatan ini memungkinkan anggota untuk melakukan evaluasi, bahkan menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan ikut mengambil keputusan dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijaksanaan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi dan menjadi basis untuk menyalurkan aspirasi.

Strategi pemberdayaan adalah mengembangkan ekonomi keluarga dengan mendorong simpan pinjam sebagai titik masuk (*entry-point-nya*) yang mengarah kepada bentuk koperasi di tingkat desa/kelurahan, sehingga yang perlu diperhatikan adalah merintis lebih maksimal lembaga keuangan Bank dan non Bank di tiap kecamatan. Dengan begitu, pemberdayaan keluarga yang *powerless* menjadi *powerfull* memerlukan payung politis sehingga pemberdayaan keluarga diselenggarakan dalam jangka panjang dan *sustainable*. Harus tidak dilupakan bahwa masyarakat Bogor adalah multi etnis sehingga strategi pemberdayaan dilakukan melalui dua cara yaitu (a) tabungan melalui kotak Amal, dan (b) tabungan melalui Bank.

Tabungan melalui kotak Amal merupakan embrio dari menabung di bank yang sebenarnya penjelmaan dari kebiasaan keluarga untuk menabung melalui celengan di tiap keluarga yang di institusionalkan dalam rangka mendidik keluarga agar selalu hidup hemat, dan membiasakan diri atau berdisiplin untuk menabung dari keuntungan, rezeki atau berkat yang diperoleh dari usaha produktif minimal Rp. 100 per hari. Kotak Amal tabungan rutin setiap hari minimal Rp. 100

bisa diberi nama "Gerakan sumbangan 100". Yang dimaksud dengan Gerakan sumbangan 100 adalah suatu gerakan menyadarkan masyarakat untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki atau berkat yang diperolehnya. Misalnya, sebuah keluarga memperoleh keuntungan Rp. 1000, maka diambil Rp.100 kemudian dimasukkan ke dalam kotak Amal di rumah masing-masing, demikian seterusnya. Kotak ini terdapat dua lubang yaitu: (1) kotak sumbangan, dan (2) kotak angsuran. Kotak sumbangan adalah kotak khusus untuk menabung sumbangan 100, sedangkan kotak angsuran adalah kotak untuk mengembalikan modal pinjaman. Uang pinjaman dipergunakan untuk modal usaha yang bersifat produktif. Tetapi setiap peminjam diwajibkan menabung untuk angsuran sebesar 10% dan untuk sumbangan 5%. Misalnya, sebuah keluarga meminjam Rp. 50.000 dan diprediksi laba minimal sebesar Rp. 2000 perhari maka akan didapati hasil sbb:

-tabungan angsuran sebesar	:	Rp. 200
-tabungan sumbangan sebesar	:	Rp. 100
-pendapatan keluarga sebesar	:	Rp. 1700

Jika jumlah peminjam sebanyak 100 orang maka setiap hari diperoleh:

-tabungan angsuran	$100 \times 200, \dots =$	Rp. 20.000,
-tabungan sumbangan	$100 \times 100, =$	Rp. 10.000,
-pendapatan anggota	$1700 \times 100, =$	Rp. 170.000,

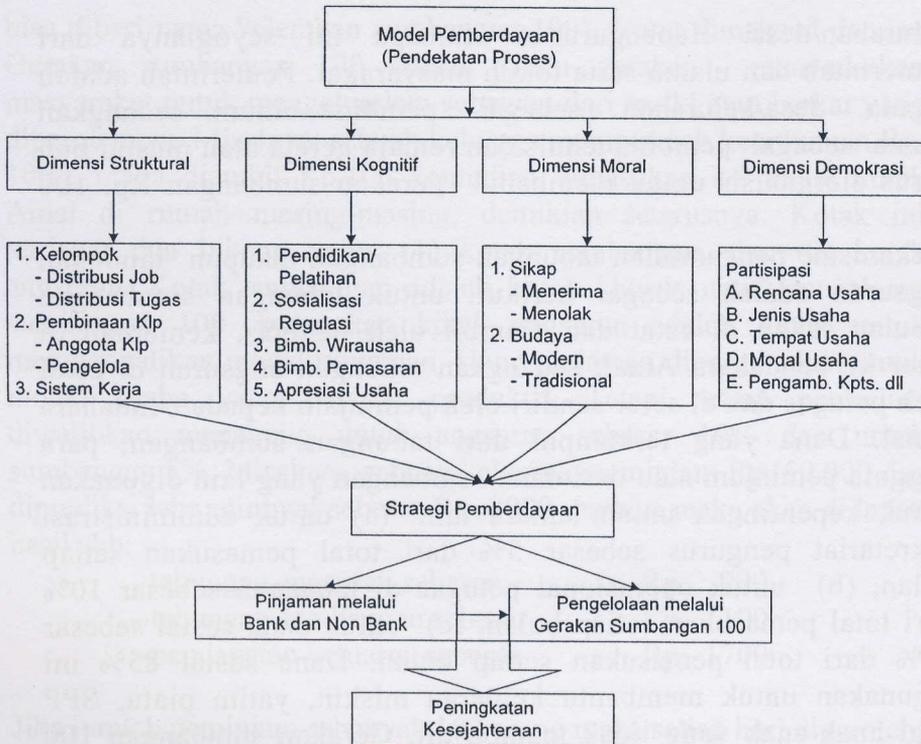
Maka dalam jangka waktu sebulan atau 30 hari akan diperoleh:

-tabungan angsuran	$20.000 \times 30 =$	Rp. 600.000,
-tabungan sumbangan	$10.000 \times 30 =$	Rp. 300.000,
-pendapatan keluarga	$170.000 \times 30 =$	Rp. 5.100.000,

Dengan jumlah modal pinjaman Rp. 5.100.000, untuk 100 peminjam, maka pengurus Amal bisa menolong sebanyak 100 pengusaha kecil, bahkan dapat menambah 12 anggota baru yang diambil dari tabungan angsuran, disamping memperoleh pemasukan dari tabungan sumbangan. Dengan demikian dapat diestimasi jika jumlah dana pinjaman lebih besar, begitu pula jumlah anggota dan pendapatan (laba) anggota lebih banyak, kesejahteraan keluarga semakin meningkat dan Insya Allah kemiskinan dapat diatasi. Untuk kelancaran Gerakan sumbangan 100 ini, kepengurusan pemberdayaan perlu dibentuk di tiap

kelurahan/desa. Kepengurusan lembaga ini seyogianya dari pemerintah dan ulama serta tokoh masyarakat. Pemerintah adalah kepala desa/kelurahan sebagai pembina umum, sedangkan ulama sebagai pembina teknis dan remaja gereja atau masjid pun harus diorganisir untuk membantu gerakan sumbangan Rp. 100 ini.

Mekanisme pengambilan tabungan sumbangan maupun tabungan angsuran adalah sebagai berikut: untuk tabungan sumbangan sebulan sekali di catat dan diambil oleh petugas, kemudian di setor ke bendahara Amal, sedangkan tabungan angsuran di catat oleh petugas dan di setor sendiri oleh peminjam kepada bendahara Amal. Dana yang terkumpul dari tabungan sumbangan, para anggota peminjam atau dari dana sumbangan yang lain digunakan untuk kepentingan umum antara lain: (a) untuk administrasi sekretariat pengurus sebesar 5% dari total pemasukan setiap bulan, (b) untuk operasional petugas di lapangan sebesar 10% dari total pemasukan setiap bulan, (c) untuk dana sosial sebesar 85% dari total pemasukan setiap bulan. Dana sosial 85% ini digunakan untuk membantu keluarga miskin, yatim piatu, SPP bagi anak-anak yang tidak mampu dll. Gerakan sumbangan 100 ini akan berhasil jika dilakukan atas dasar keikhlasan, kejujuran, dan kedisiplinan, tanpa kesemua tuntutan moral, tidak mungkin akan berhasil. Pendapatan bersih keluarga dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif, kebutuhan produktif, dan sebagiannya ditabung di bank. Gerakan seperti ini diasumsikan bahwa keluarga menggunakan pinjaman tersebut untuk lebih dari satu maksud, atau mempunyai beberapa usaha. Pemberian kredit tanpa jaminan, dan keluarga yang tepat mengembalikan pinjaman, dapat diberikan pinjaman kedua yang lebih besar.



Gambar 1 Model Pemberdayaan yang Berorientasi Proses Belajar

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktek Manajemen Sumberdaya Keluarga
Pendidikan KK yang tinggi dapat melakukan pembagian tugas, sedangkan keluarga dengan pendapatan tinggi melakukan pengontrolan atas kegiatan, sementara itu, responden di kota dapat melakukan perencanaan dan pembagian tugas
2. Analisis Tingkat Kesejahteraan. Menurut kriteria BKKBN dan Persepsi Keluarga, responden di kota lebih banyak yang miskin dari pada yang tidak miskin, sebaliknya responden di desa

menurut kriteria Persepsi Keluarga adalah lebih banyak yang miskin dari pada yang tidak miskin. Sementara itu, kriteria lain menggambarkan responden di kota maupun di desa tidak miskin lebih besar jika dibandingkan dengan yang miskin.

3. Analisis Model Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan keluarga miskin melalui model pendekatan "proses", yang memiliki tiga dimensi yaitu: dimensi struktural dan fungsional, dimensi kognitif dan asas demokrasi. Strategi pemberdayaan adalah dengan mendorong simpan pinjam sebagai *entry point*-nya yang mengarah kepada bentuk koperasi di tingkat desa/kelurahan, sehingga perlu dirintis lembaga keuangan Bank dan non Bank di tiap kecamatan. Pemberdayaan mereka yang tergolong *powerless* menjadi *powerfull* memerlukan payung politis dalam jangka panjang dan *sustainable*. Taktik pemberdayaan dilakukan melalui dua cara yaitu tabungan melalui kotak Amal dan tabungan melalui bank. Setiap keuntungan atau rezeki yang diperoleh diwajibkan menabung Rp.100/hari. Harus tidak dilupakan bahwa masyarakat Bogor adalah multi etnis, sehingga institusi lokal seperti ini dapat diberi nama "Gerakan Sumbangan 100".

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam tulisan ini adalah:

1. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program penanggulangan kemiskinan, perlu adanya konsensus yg sama dalam penggunaan indikator .
2. Pendekatan pengukuran tingkat kesejahteraan keluarga dengan kriteria BKKBN menunjukkan sensitifitas dan spesifisitas yang cukup tinggi. Dalam penelitian ini kriteria BKKBN di ukur dengan 6 pertanyaan yang bersifat ekonomi yaitu: makan <2 kali/hari, lantai sebagian besar dari tanah, tidak mempunyai pakaian yang berbeda, makan daging/telur/ikan minimal 1 minggu sekali, membeli baju baru minimal sekali setahun, dan luas lantai rumah rata-rata <8m² . Pada kenyatannya secara umum sebagian besar (>90%) responden makan 2 kali atau lebih dalam sehari, lantai rumah sebagian besar dari kramik, mempunyai pakaian

yang berbeda, makan ikan/telur setiap hari kecuali daging, dan membeli baju baru sekali setahun Oleh karena itu perlu ada penelitian lanjutan dalam rangka menyederhanakan indikator-indikator tersebut yang dilengkapi dengan simulasi untuk memperoleh ketepatan (presisi) dan keabsahan (validitas) atau keakuratan (*accuracy*) dalam memperoleh sensitifitas dan spesifisitas yang selanjutnya dapat digunakan sebagai standar nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous*, 1989. Penelitian Evaluasi Proyek Penyantunan dan Pengentasan Fakir Miskin. Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial. Jakarta
- Bank Dunia ,2006. Kemiskinan, Bank Dunia, dan Revitalisasi Pertanian. <http://www.kompas.com>
- BPS, 2006. Tingkat Kemiskinan di Indonesia. <http://www.bps.go.id>
- Berlo, D.K. 1960. *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice*, Holt Rinehart and Winston, Inc. New York
- Collett, D. 1991. *Modelling Binary Data*. Chapman and Hall. London
- duniaesai.com. 2006. Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan. <http://www.duniaesai.com/ekonomi>
- Fraenkel & Wallen. 1993. *How To Design and Evaluate Research in Education Secon Edition*. New York. Mc. Graw-Hill.Inc
- Herbert, P. 2001. *The DAC Guidelines Poverty Reduction*
- Korten, C. David and Felipe B Alfonso. 1981. *Bureaucracy and The Poor: Closing The Gap*. Mc Graw Hill International Book Company. Singapore
- Muhaimin, Y. 2000. Birokrasi dan Muhammadiyah. *Muhammadiyah University Press*, Surakarta.
- Muller, 1992. Mengukur Sikap Sosial. Bumi Aksara. Jakarta
- Pudjiwati, S. 1985. Sosiologi Pembangunan. Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta Bekerjasama dengan BKKBN. Jakarta
- Rahardjo, D. 2000. Pengembangan Perekonomian Masyarakat : Sebuah Alternatif Model Bagi Muhammadiyah. *Muhammadiyah University Press*, Surakarta

- Sarwoprasodjo, S. 1993. *Dinamika dan Perkembangan Kelompok Usaha Bersama Golongan Miskin Dalam Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial*. Program Pascasarjana IPB. Bogor
- Soetandyo, W. 1994. *Misi dan Fungsi Pendidikan*. Sebuah Makalah Pengantar untuk Rujukan Ceramah Berikut Diskusinya tentang Pendidikan Sains, Tehnologi, dan Humaniora di Indonesapada Era Industrialisasi dan Globalisasi yang diselenggarakan dalam acara Seminar Nasional Dalam Rangka Lustrum VIII IKIP Malang 19 Nopember 1994
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Setiawan, B, & Muntaha, A. 2000. *Metode Penelitian Komunikasi*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Suyono, 1997. *Program Penghapusan Kemiskinan*
- Tjiptoherijanto, P. 2002. *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta